

**Peran dan Strategi Lembaga Swadaya Masyarakat
dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat
(Studi Kasus di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)**

***The Role and Strategy of Non-Governmental Organizations
in Social Economic Empowerment of the Community
(A Case Study in Manggarai Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia)***

Rudolof Ngalu¹, Yohannes M. Jamun², dan Heronimus E. Wejang³

^{1,2,3}Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur

Jl. Ahmad Yani, No. 10 Ruteng, 86508

e-mail: ngalurudolf@gmail.com, HP. 087762652161

tanggal di terima 01 Juli 2019, tanggal di perbaiki 29 November 2019, tanggal di setujui 31 Desember 2019

Abstract

This research was motivated by concerns about poverty which had become an acute problem in Manggarai Regency. Although various types of government social assistance programs continued to be rolled out and the development paradigm had shifted from a centralized to a decentralized system, poverty rates remained relatively high. In the midst of this condition, the presence of NGOs was an alternative option and hope. The main problem examined in this paper was how the role and strategy of NGOs in empowering the socio-economic community in Manggarai Regency. This paper was the result of research with a qualitative approach and case study method. Data collection was done through interviews and document studies. Data analysis used the Miles and Huberman model which consisted of data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that NGOs working in Manggarai Regency had carried out the role of community empowerment in the socio-economic field. Strategies developed by NGOs included: (1) group-based approaches, (2) changes in ways of thinking, (3) participation and capacity building, (4) institutional strengthening for long-term independence. The challenges faced by NGOs in carrying out their roles were: (1) NGO personnel capacity was minimal, (2) NGO capacity was still lacking in determining target villages, (3) people's thinking was wrong and (4) partnerships with government, which were too bureaucratic.

Keywords: NGO; empowerment; community; Manggarai District

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan tentang kemiskinan yang telah menjadi masalah akut di Kabupaten Manggarai. Walaupun berbagai jenis program bantuan sosial pemerintah terus digulirkan dan paradigma pembangunan sudah bergeser dari sistem sentralistik ke desentralistik, angka kemiskinan relatif tetap tinggi. Di tengah kondisi ini, kehadiran LSM menjadi opsi dan harapan alternatif. Permasalahan utama yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana peran dan strategi LSM dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Manggarai. Tulisan ini adalah hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM yang berkarya di Kabupaten Manggarai telah menjalankan peran pemberdayaan masyarakat di bidang sosial ekonomi. Strategi yang dikembangkan oleh LSM meliputi (1) pendekatan berbasis kelompok, (2) perubahan cara berpikir, (3) partisipasi dan peningkatan kapasitas, (4) penguatan kelembagaan demi kemandirian jangka panjang. Tantangan yang dihadapi LSM dalam menjalankan perannya adalah: (1) kapasitas personalia LSM yang minim, (2) kapasitas LSM masih kurang dalam menentukan desa sasaran, (3) cara berpikir masyarakat yang keliru, dan (4) kemitraan dengan pemerintah yang terlampaui birokratik.

Kata Kunci: LSM; pemberdayaan; masyarakat; Kabupaten Manggarai

A. Pendahuluan

Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah cukup lama menyandang predikat sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia. Sumber daya manusia yang rendah merupakan salah satu pemicu sekaligus eksese negatif persoalan kemiskinan. Menurut data BPS nasional tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT pada tahun 2017 berada pada angka 63,73. Dengan angka ini, NTT menempati urutan ke-31 dari 34 provinsi. Itu berarti ia berada dalam kelompok tiga terbawah bersama Papua Barat dan Papua (BPS, 2018: 2). Jumlah penduduk miskin di NTT pada Maret 2018 mencapai 1.142,17 ribu orang atau 21,35 persen dari jumlah seluruh penduduk. Jumlah ini naik sekitar 7.430 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada 2017 yang berjumlah 1.134,74 ribu orang (21,38 persen) (BPS, 2018: 4).

IPM Provinsi NTT ini merupakan representasi dari keadaan semua kabupaten di wilayah NTT, termasuk Kabupaten Manggarai yang menjadi lokus penelitian/tulisan ini. Masyarakat NTT yang miskin adalah potret kemiskinan masyarakat manggarai juga. Pernyataan ini dikonfirmasi oleh data tentang tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai. Data BPS pada tahun 2015 menyebutkan bahwa 42.845 rumah tangga yang ada di Kabupaten Manggarai berada pada zona miskin dengan perincian sekitar, 5.702 di antaranya termasuk kategori sangat miskin, 8.211 miskin, 5.894 hampir miskin, dan 23.038 rentan miskin (BPS, 2016: 56). Data ini tidak banyak berubah di tahun 2016 dan 2017. Dengan mengacu pada pengumpulan basis data terpadu tahun 2015, BPS mencatat dari 179.612 jumlah penduduk Kabupaten Manggarai, 58.667 di antaranya sangat miskin, 63.856 miskin, 44.723 hampir miskin, dan 12.366 rentan miskin (BPS, 2017: 61; BPS, 2018: 58).

Pemerintah Republik Indonesia sangat gencar menggalakkan upaya pengentasan kemiskinan sejak era reformasi bergulir. Berbagai program bantuan sosial untuk masyarakat mis-

kin sudah dan sedang digulirkan pemerintah. Pemerintah sesungguhnya telah menyalurkan sekurang-kurangnya ada 25 (dua puluh lima) jenis program bantuan sosial-ekonomi melalui sejumlah kementerian dengan total dana mencapai Rp 204 triliun sampai tahun 2017. (TNP2K, 2018: 4-5). Beberapa di antaranya yang cukup populer adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Sejahtera (Rastra), dan lain sebagainya.

Hasil evaluasi menunjukkan program bansos ini belum secara efektif dan optimal mengatasi masalah kemiskinan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan bahwa salah satu penyebab tidak efektif dan tidak optimalnya bantuan pemerintah adalah “penargetan penerima bantuan serta manajemen distribusi bantuan yang belum tepat dan memadai” (TNP2K, 2018: 2). Selain itu, menurut Gemiharto dan Rosfiantika (2017: 107) kebijakan dan tata kelola pengentasan kemiskinan tidak akan efektif kalau hanya menyentuh aspek peningkatan pendapatan dan tidak berorientasi pada peningkatan kemampuan kaum miskin dan peningkatan peluang ekonomi, politik, dan sosial mereka. Bansos dari pemerintah selama ini lebih banyak bersifat karitatif dengan kemanfaatan jangka pendek. Artinya bantuan pemerintah tersebut diberikan secara cuma-cuma dan langsung berorientasi pada penyelesaian masalah sosial-ekonomi masyarakat secara instan. Pemerintah belum berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan menciptakan kemandirian sosial ekonomi secara jangka panjang melalui berbagai jenis bantuan ini. Masyarakat memang langsung merasakan manfaat dan terlihat bisa segera menyelesaikan masalah dengan adanya bantuan-bantuan berpola serupa ini. Akan tetapi di sisi lain, masyarakat menjadi terlena, dimanjakan dan tidak memiliki keberdayaan secara jangka panjang dengan pola pemberian bantuan seperti ini.

Pemerintah juga telah mengubah paradigma pembangunan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik. Paradigma ini secara instusional dan yuridis diwujudkan dengan kebijakan otonomi daerah yang mulanya menasar daerah provinsi dan kabupaten kemudian dalam kebijakan beberapa tahun terakhir menaruh perhatian besar pada pembangunan desa. Kebijakan desentralisasi seperti ini berimplikasi pada perubahan pola dan strategi pelibatan masyarakat dalam pembangunan dari pola *top down* menjadi *bottom up*, dari *growth strategy* ke *people centered strategy* (Purwowibowo, 2018: 290). Itu berarti pembangunan hendak diubah, tidak lagi berbasis kepentingan elit, tetapi berdasar pada kebutuhan masyarakat. Pergeseran paradigma dan pola pembangunan ini sejatinya memberi ruang yang lebih luas bagi inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat dituntut untuk proaktif dan kreatif dalam mengambil prakarsa dalam pembangunan. Perubahan ini sesungguhnya memberi harapan bagi perbaikan kondisi kemiskinan di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi NTT atau Kabupaten Manggarai pada khususnya.

Ruang dan peluang partisipasi ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena rendahnya kualitas sumber daya manusia pada sebagian besar masyarakat. Tata kelola pemerintahan daerah pun masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan daya beli untuk pemenuhan kebutuhan secara *hic et nunc*. Dimensi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi jangka panjang belum sungguh menjadi fokus pemerintah daerah.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bisa menjadi harapan di tengah kesulitan ini. Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memberi definisi tentang LSM dalam kerangka pengertian tentang Ormas pada umumnya, yaitu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tu-

juan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Senada dengan itu, Gaffar (2006: 200-201) menyebut LSM sebagai organisasi mandiri yang tidak menggantungkan diri pada pemerintah atau pada negara, baik dalam bentuk dukungan finansial maupun dalam penyediaan sarana dan prasarana. LSM dapat berdiri jika terdapat komitmen, visi, dan misi dari sekelompok orang terhadap persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Menurut Hagul (1992: 52), sekurang-kurangnya ada lima ciri yang memberi identitas bagi setiap LSM, yaitu: (1) menjangkau yang paling miskin; (2) partisipasi atau *bottom-up*; (3) tidak birokratis; (4) bisa bereksperimen; dan (5) biaya murah. Dari uraian ini, terlihat bahwa salah satu misi dan peran utama adalah memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, kondisi kemiskinan dan SDM masyarakat yang rendah bisa menjadi fokus dan locus program kerja LSM.

Pemberdayaan itu sendiri dipahami dalam dua dimensi arti, yaitu sebagai proses dan sebagai tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memerkuat kekuasaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Kedua dimensi arti ini memiliki kaitan yang amat erat. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai proses (Suharto, 2009: 60)

Ukuran keberhasilan pemberdayaan menurut Kiefer (1981) dalam Suharto (2009: 63) sekurang-kurangnya ditunjukkan oleh 4 (empat) dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*). *Kekuasaan di da-*

lam berkaitan dengan kesadaran dan keinginan internal dalam diri masyarakat untuk berubah; *Kekuasaan untuk* berhubungan dengan kemampuan individu untuk berubah dan memperoleh akses; *Kekuasaan atas* bertalian dengan kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan; dan *kekuasaan dengan* bertautan dengan meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama orang lain untuk mengatasi hambatan-hambatan. Pelaksanaan proses, pencapaian tujuan dan indikator pemberdayaan di atas tercapai melalui penerapan pendekatan atau pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5 P, yaitu: Pemungkinan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.

Penelitian dan artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran dan strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM-LSM yang ada di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fokusnya adalah pada LSM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Secara kualitatif juga akan dikaji hambatan dan penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan peran LSM. Kajian ini dirasakan sangat urgen untuk memberi informasi yang bisa menjadi catatan evaluatif bagi perbaikan peran dan strategi pemberdayaan yang dilakukan LSM. Dengan itu, LSM bisa berusaha meningkatkan kapasitas dan kualitas perannya agar menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dianggap cocok untuk meneliti masalah seputar peran pemberdayaan masyarakat yang dilakoni oleh LSM. Masalah ini diyakini bersifat amat kompleks, dinamis, dan penuh makna. Penulis akan mencoba menelusuri setiap fenomena sambil mengurai makna yang terkandung di dalamnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri atas (1) Aktivistis LSM di Kabupaten Manggarai, (2) Kepala Desa/Kelurahan Mitra

LSM, (3) Unsur Pemerintah Daerah/Pimpinan Dinas di Pemda yang berkaitan dengan LSM dan pemberdayaan masyarakat, dan (4) Wakil masyarakat mitra LSM. Selain wawancara, penulis juga mengumpulkan data melalui studi dokumen. Penulis melakukan pembacaan secara intensif terhadap dokumen-dokumen dan sumber-sumber tertulis, terutama berupa arsip-arsip program kerja LSM dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, hasil riset, dalil/hukum-hukum, undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, dan lain-lain yang berhubungan dengan LSM dan pemberdayaan masyarakat.

Subjek penelitian ini adalah LSM yang memiliki program pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Manggarai. Secara purposif, penulis/peneliti memilih tiga LSM yang dianggap secara konsisten menjalankan program pemberdayaan masyarakat dalam tiga tahun terakhir. LSM itu adalah Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Tunas Jaya/Yayasan Maria Moe Peduli (YTJ/YMP) dan Komisi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Keuskupan Ruteng (PSE Keuskupan Ruteng).

Analisis data menggunakan teknik analisis data berdasarkan model B. Mathew Miles dan A. Michael Huberman terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: *reduksi data*, *penyajian data*, dan *penarikan kesimpulan/ verifikasi* (Miles dan Huberman, 1992: 16).

C. Hasil dan Pembahasan

Program LSM dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Manggarai

Peran LSM dalam pemberdayaan sosial ekonomi di Kabupaten Manggarai di antaranya dijalankan melalui tiga program *livelihood*, *Strategic Planning and Action to Strengthen Rural Communities* (SPARC), dan *pembentukan serta penguatan koperasi kredit*. Ketiga program ini masing-masing dijalankan oleh tiga LSM, yaitu WVI, YTJ/YMP, dan PSE Keuskupan Ruteng. Tiga lembaga ini merupakan LSM yang dike-

nal aktif dan konsisten melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Manggarai dalam tiga tahun terakhir.

Livelihood yang dijalankan WVI adalah program peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan sumber-sumber ekonomi lokal. Ada 3 (tiga) bagian utama dalam *Livelihood*, yaitu pemberdayaan petani melalui budidaya tanaman hortikultura, pemberdayaan ibu rumah tangga pengrajin lokal melalui pendampingan kerajinan tenun lokal, dan pemberdayaan petani melalui pendampingan petani kopi dengan komoditas lokal. Dari ketiga bagian kegiatan *livelihood*, budidaya tanaman hortikultura dianggap sebagai yang paling efektif berjalan. Menurut *Semi-Annual Report Progress Summary* WVI tahun 2019, jumlah masyarakat di Kabupaten Manggarai yang didampingi WVI dalam program *Livelihood* berjumlah 532 orang yang tergabung dalam 40 kelompok tani di 23 desa di 3 kecamatan, yaitu Cibal, Rahong Utara, dan Ruteng. Program ini dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, yaitu dari 2018 sampai dengan 2020. (WVI, 2019:7; Wawancara Manajer WVI Manggarai, DP, 29/4/2019).

SPARC yang dilaksanakan oleh YTJ/YMP adalah proyek adaptasi iklim dalam rangka mengurangi risiko perubahan iklim pada tiga sektor utama, yaitu ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, dan mata pencaharian. SPARC memiliki implikasi pada pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat karena ketiga sektor utama yang menjadi fokus program ini memiliki korelasi erat dengan keberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Perubahan iklim yang terjadi kian ekstrim menciptakan kerentanan sosial-ekonomi pada masyarakat. Program ini sejatinya merupakan proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Provinsi NTT dengan dukungan dana dari *Special Climate Change Fund of Global Environment Facility (GEF)* dan *United Nations Development Programme (UNDP)*. YTJ/YMP dipilih sebagai LSM lokal karena dianggap memiliki tenaga

fasilitator lapangan yang terlatih untuk melakukan pendampingan langsung kepada kelompok masyarakat sasaran. (Wawancara JJ, Anggota LSM YTJ/YMP, 25/5/2019). Kegiatan yang dijalankan sejak 2013 hingga 2018 ini, berlokasi di 7 desa di 5 kecamatan (Cibal, Wae Ri'i, Satar Mese, Rahong Utara, dan Ruteng) dalam wilayah Kabupaten Manggarai. Masyarakat yang didampingi dalam program ini berjumlah 1884 orang yang tergabung dalam 82 kelompok kegiatan (KLKH, 2016).

PSE Keuskupan Ruteng menjalankan program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui pembentukan dan penguatan koperasi kredit (kopdit) Kopdit merupakan lembaga keuangan yang bergerak pada kegiatan simpan pinjam dengan pengelolaan oleh masyarakat secara mandiri untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kopdit memungkinkan akses yang mudah pada penyediaan modal usaha bagi masyarakat atau pemenuhan kebutuhan sekarang nanti melalui fasilitas simpan dan kredit. Ada dua bagian dalam program pemberdayaan PSE Keuskupan Ruteng ini, yaitu pertama pembentukan kopdit, dan kedua penguatan kopdit. Pada bagian pertama, PSE Keuskupan Ruteng sudah berhasil membentuk 31 kopdit sejak tahun 1999. Dari ke-31 kopdit yang ada, baru 6 di antaranya yang sudah masuk dalam Puskopdit dan Inkopdit. Keenam koperasi ini sudah beranggotakan ribuan orang dengan aset menembus angka milyaran rupiah. Pada bagian kedua, PSE Keuskupan Ruteng memfokuskan diri pada proses penguatan kopdit yang sudah ada (Wawancara RP, Ketua PSE Keskupan Ruteng, 30/5/2019)

Strategi Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat oleh LSM di Kabupaten Manggarai

LSM menjalankan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Manggarai melalui 4 (empat) strategi, yaitu: *pendekatan berbasis kelompok, perubahan cara berpikir, partisipasi dan peningkatan kapasitas, dan penguatan kelembagaan demi kemandirian jang-*

ka panjang. Keempat strategi ini dijalankan secara integratif dan bersifat komplementer. Artinya, keempatnya dilaksanakan sebagai satu kesatuan strategi dengan karakter satu melengkapi yang lain.

Pertama, pendekatan berbasis kelompok. Ketiga program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang diuraikan di atas semuanya menerapkan pendekatan kolektif berbasis kelompok. Dalam menjalankan program *livelihood*, WVI menggunakan pendekatan atau strategi berbasis kelompok. Ada dua kategori kelompok yang dimaksudkan di sini, yaitu dalam cakupan lebih besar, yakni desa dan dalam cakupan yang lebih kecil dan spesifik, yakni kelompok tani. Proses pendekatan WVI pertama-tama dilakukan ke desa sasaran. Desa umumnya diminta kesediaan untuk menjalankan fungsi kordinasi. Namun, WVI juga secara khusus menjajaki kemungkinan adanya kerja sama lain dalam bentuk “tukar budget” atau pendanaan bersama. Kepala desa selanjutnya memfasilitasi WVI untuk bertemu poktan. WVI menjelaskan rencana program, seluruh proses, tujuan, serta manfaat yang akan diperoleh kepada poktan. WVI menegaskan bahwa, pendampingan tidak akan diberikan secara individual, tetapi secara kolektif dalam poktan. (Wawancara YH, kordinator lapangan Program WVI, 20/4/2019 dan SP, Kepala Desa dan Anggota Poktan, 27/4/2019)

Dalam program SPARC, pendekatan berbasis kelompok juga dilakukan terhadap desa. Desa kemudian membentuk Kelompok Masyarakat Program Kampung Iklim (Kemas ProKlim) dan kelompok primer atau kelompok kegiatan. Desa juga mengemban fungsi kordinasi. Sementara Kemas ProKlim adalah kelompok penerima dana dan pendampingan yang kemudian bisa merancang dan membentuk kelompok-kelompok primer dengan aneka kegiatan sesuai kebutuhan. Kegiatan-kegiatan itu meliputi 3 aspek, yaitu menciptakan ketahanan air bersih, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi.

Sementara dalam program pembentukan dan penguatan koperasi kredit oleh PSE Keuskupan Ruteng, pendekatannya juga berbasis kelompok melalui jalur paroki. Paroki adalah sebutan bagi wilayah pelayanan umat dalam Gereja Katolik Lokal. Wilayah paroki biasanya mencakup satu atau lebih desa. Dalam paroki ini program ini akan didukung oleh komisi PSE tingkat paroki yang kemudian akan menjaring umat atau masyarakat untuk menjadi pengurus dan pengelola kopdit primer di tingkat paroki. Komisi PSE tingkat paroki bersama pengurus dan pengelola kopdit akan mengikuti pelatihan pengelolaan koperasi baik dari sisi administratif, maupun dari sisi organisasional.

Kedua, perubahan cara berpikir. Proses perubahan cara berpikir dalam program *livelihood* misalnya dimulai saat WVI mendatangi desa dan poktan untuk mensosialisasikan program. Saat itu ada penjelasan tentang rencana, pelaksanaan, hasil serta manfaat yang diperoleh dari program. Selanjutnya perubahan cara berpikir dilakukan melalui studi banding ke wilayah tertentu yang telah berhasil mengembangkan kegiatan yang sama. WVI dalam program *livelihood* bidang budidaya hortikultura pernah membawa beberapa poktan untuk melakukan studi banding di Merbabu, Jawa Tengah.

Ketiga, partisipasi dan peningkatan kapasitas. Dalam program *livelihood* WVI, partisipasi dan peningkatan kapasitas dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Partisipasi saat perencanaan diwujudkan dengan adanya kewajiban dari poktan dampingan untuk membuat proposal rencana kerja secara tertulis. Dalam proposal yang dibuat oleh poktan itu, diuraikan uraian kebutuhan, jadwal pengerjaan, dan estimasi target yang akan dihasilkan. Dokumen perencanaan ini adalah syarat mutlak untuk menerima dana dan proses pendampingan. Pada saat pelaksanaan, semua anggota poktan akan berpartisipasi dalam aneka pelatihan dan pelaksanaan kerja di poktannya. Sementara dalam evaluasi, partisipasi ditunjukkan dengan membuat laporan hasil kegiatan yang berisi

sejauh mana pelaksanaan kerja telah mencapai target yang direncanakan. Partisipasi itu terjadi dalam dinamika dan kolaborasi dalam kelompok atau antarkelompok.

Partisipasi dan peningkatan kapasitas juga menjadi strategi utama dalam SPARC. Hal itu tampak dalam alur pembentukan Kemas ProKlim yang sangat partisipatif. Proses itu dimulai dengan *focussed group discussion* untuk menggali pendapat tentang pembentukan kelompok dan pilihan kegiatan-kegiatan yang sesuai, serta dalam perumusan visi misi kelompok. Selanjutnya, ada kerja pemilihan kepengurusan Kemas ProKlim, penyusunan AD/ART kelompok dan proses legalisasi kelompok. Kerja partisipatif kemudian terwujud dalam penyusunan rencana kerja dan proposal.

Keempat, penguatan kelembagaan demi kemandirian jangka panjang. Semua program pemberdayaan sosial ekonomi dari ketiga LSM ini menggunakan strategi penguatan kelembagaan. Dalam *livelihood*, penguatan kelembagaan dilakukan di dalam kelompok tani. Kelompok tani diperkenalkan dan dilatih dengan berbagai pengetahuan, teknik dan keterampilan baru. Poktan juga dibantu untuk mendapatkan status legal dari instansi pemerintahan terkait. Lebih jauh penguatan kelembagaan dalam program *livelihood* secara monumental tercapai dengan terbentuknya Asosiasi Petani Hortikultura (APH) Kecamatan Cibai. APH menjadi wadah kerja sama antarpoktan sekaligus menjadi lembaga yang melindungi petani dari persaingan pasar yang tak sehat.

Sementara itu, dalam program SPARC, penguatan kelembagaannya diwujudkan dengan pembentukan Kemas ProKlim yang berbadan hukum. Kelompok ini menjadi jaminan keberlanjutan program di masa yang akan datang dan garansi terciptanya kemandirian secara jangka panjang.

Tantangan

Sekurang-kurangnya ada empat tantangan yang dihadapi LSM dalam menjalankan peran pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat di

Kabupaten Manggarai, yaitu: (1) kapasitas personalia LSM yang minim, (2) kapasitas kelembagaan dalam analisis situasi yang kurang, (3) cara berpikir masyarakat yang keliru dan (4) kemitraan dengan pemerintah yang terlampaui birokratik.

Pertama, kapasitas personalia LSM yang minim. Tantangan ini dialami oleh WVI dalam pelaksanaan program *livelihood*. Dalam sebuah wawancara dengan salah seorang koordinator lapangan kegiatan pemberdayaan WVI, diperoleh informasi bahwa semua pendamping lapangan WVI tidak memiliki kapasitas dan keahlian teknis khusus berkaitan dengan kegiatan yang dijalankan di tengah masyarakat. Informan mencontohkan dirinya sendiri sebagai koordinator lapangan kegiatan budidaya tanaman hortikultura. Latar belakang pendidikannya sangat berbeda dengan hal teknis yang ada dalam pelaksanaan program. Hal ini menyebabkan permasalahan teknis mendesak yang dialami masyarakat tidak bisa langsung teratasi

Dalam menghadapi ketiadaan tenaga teknis ini, WVI menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah daerah dan bermitra dengan pihak swasta. Dengan pemerintah, WVI menggandeng Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian dalam koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai. PPL membantu petani dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait proses budidaya hortikultura secara umum. Sementara dengan pihak swasta, WVI membangun kerja sama dengan PT Panah Merah. PT Panah Merah ini secara khusus memberikan layanan konsultasi teknis bagi permasalahan di bidang pertanian, khususnya dalam proses produksi atau budidaya tanaman hortikultura

Kedua, kapasitas kelembagaan dalam analisis situasi yang kurang. Hal ini dialami oleh YTJ/YMP dalam perencanaan program SPARC. Salah satu anggota LSM ini mengakui bahwa penentuan desa yang menjadi sasaran program ini tidak atas analisis situasi yang akurat. Menurut pengalaman YTJ/YMP, sebenarnya ada desa lain yang lebih urgen membu-

tuhkan SPARC daripada desa yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Analisis situasi yang keliru ini menyebabkan program tidak benar-benar berdampak optimal.

Ketiga, cara berpikir masyarakat yang keliru. Tantangan ini dialami oleh semua LSM. Ketika menawarkan program kepada masyarakat, sebagian masyarakat mengharapkan program ini seperti program bantuan sosial dari pemerintah yang berwujud uang atau barang pemenuhan kebutuhan konsumsi. Ketika, program mensyaratkan ada kerja mandiri dan partisipasi, banyak masyarakat yang enggan menerima

Keempat, kemitraan dengan pemerintah yang terlampau birokratis. Tantangan ini dialami oleh YTC/YMP. Karena SPARC adalah proyek pemerintah, setiap pengambilan keputusan harus selalu dalam kordinasi dengan tim teknis di pemerintah, dalam hal ini Bappelitbang. Seringkali kebutuhan mendesak dari desa atau Kemas ProKlim tidak bisa langsung dipenuhi karena harus menunggu proses kordinasi yang terlampau panjang dan birokratis.

Pembahasan

Karakteristik umum masyarakat Kabupaten Manggarai yang menjadi mitra ketiga LSM ini adalah masyarakat tradisional. Sebagian besar mereka bekerja sebagai petani tradisional yang bersifat subsisten. Artinya, mereka bertani dengan teknik dan pola lama dengan hasil bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari secara seadanya. Tingkat pengetahuan mereka akan profesi yang mereka geluti juga amat minim. Hal ini karena tingkat pendidikan mereka yang relatif rendah.

LSM telah cukup membantu masyarakat dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Manggarai di tengah kondisi dan karakteristik yang tersebut di atas. Ada beberapa manfaat konkret yang dirasakan masyarakat mitra dari program pemberdayaan LSM di Kabupaten Manggarai. *Pertama*, perubahan cara pandang dan pola kerja dalam menggeluti mata pencaharian. Hampir semua masyarakat mitra LSM adalah petani yang masih menganut dan

mewarisi pola lama/tradisional dalam menggeluti profesi. Pendampingan, pelatihan teknis, dan kegiatan studi banding yang dijalankan oleh LSM telah perlahan mengubah pola berpikir dan teknik kerja mereka.

Kedua, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan. Program pemberdayaan dari ketiga LSM yang diteliti membawa manfaat dalam bentuk bertambahnya pendapatan dan membaiknya tingkat kesejahteraan.

Ketiga, ada prospek keberdayaan dan kemandirian secara jangka panjang. Salah satu strategi pemberdayaan yang dikembangkan LSM di Kabupaten Manggarai adalah pembentukan dan penguatan kelembagaan di tengah masyarakat. Kehadiran lembaga ini menjadi salah satu jaminan terciptanya kemandirian secara jangka panjang. Selain itu, partisipasi dan peningkatan kapasitas individu juga secara prospektif menjanjikan keberlanjutan proses pemberdayaan masyarakat.

Efektivitas kerja LSM di Kabupaten Manggarai ditunjang oleh pilihan pendekatan dan strategi yang dikembangkan. Apabila mencermati strategi yang diterapkan oleh ketiga LSM di atas, ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosio ekonomis dan pendekatan sosio reformis. Menurut Prijono dan Pranarka (1996: 17), pendekatan sosio ekonomis adalah pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa orang miskin mempunyai potensi untuk mengatasi masalah sosial ekonomi mereka sendiri. Kalau potensi itu diperkuat maka mereka akan menjadi mandiri dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Pendekatan ini sering disebut pemberdayaan. Sementara pendekatan sosio-transformis didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah mengupayakan perubahan sikap, tingkah laku, pandangan, dan budaya masyarakat. Upaya yang dilakukan dengan cara memerjuangkan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan dan partisipatif.

Selain itu, bila ditinjau dari indikator-indikator keberdayaan, LSM telah cukup membantu masyarakat untuk memiliki keberdayaan

(Suharto, 2009: 63). Melalui program LSM, masyarakat di Kabupaten Manggarai telah memiliki *power within*, yaitu keinginan dari dalam diri sendiri untuk berubah. Hal itu terjadi karena LSM berhasil mengubah pola pikir masyarakat melalui agitasi, sosialisasi atau studi banding yang menampilkan hal-hal positif yang bisa dipetik dari program yang dibuat. LSM juga telah memungkinkan peningkatan kapasitas dalam diri masyarakat yang membuat mereka memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai hal yang dibutuhkan secara sosial-ekonomi (*power to*). Dengan pendekatan LSM yang berbasis kelompok, masyarakat juga mempunyai *power with*, yaitu adanya soliditas dan solidaritas dengan orang lain dalam mengatasi aneka hambatan sosial-ekonomi.

Dengan formulasi dan perspektif berbeda, dilihat dari teori ACTORS yang dikembangkan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay, masyarakat Manggarai yang bermitra dengan LSM telah mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk bisa berdaya secara sosial ekonomi. LSM telag memberi *Authority*, kekuasaan dan kewenangan dengan kepercayaan untuk mengikuti program. LSM juga telah menumbuhkan rasa percaya diri dan kompetensi (*Confidence and Competence*), melalui aneka pelatihan dan pembelajaran yang diberikan. Masyarakat juga semakin memiliki keyakinan (*trust*) bahwa mereka bisa mengubah dan menentukan nasib mereka sendiri. LSM juga telah menyediakan banyak kesempatan (*Opportunity*), tanggung jawab (*Responsibilities*) dan dukungan (*Support*) untuk menjadi berdaya dan maju secara sosial ekonomi.

D. Penutup

Kesimpulan

LSM telah cukup menunjukkan diri sebagai alternatif yang bisa membantu masyarakat untuk menjadi berdaya secara sosial-ekonomi di Kabupaten Manggarai. LSM menawarkan pendekatan yang berbeda dengan arus utama pembangunan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Bila pemerintah berfokus pada per-

tumbuhan ekonomi secara makro, LSM memilih memusatkan perhatian pada kemandirian sosial ekonomi secara mikro. Bila pemerintah belum bisa lepas dari pola *top down*, LSM selalu mengedepankan pola *bottom up*.

Alih-alih bersifat substitutif, peran pemerintah dan LSM harusnya bersifat komplementer. Keduanya harus menjalin kemitraan yang strategis dan konstruktif. Bahkan, jika memungkinkan, pemerintah bisa mereplikasi pendekatan dan strategi LSM dalam menjalankan roda pembangunan. Dengan demikian masalah kemiskinan bisa diatasi dan kemandirian serta keberdayaan masyarakat akan tercapai.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk LSM yang berkiprah di bidang pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. LSM diharapkan tetap konsisten dengan esensi keberadaan dan misi pemberdayaannya sambil terus melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan untuk menjawab tantangan perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Kedua, untuk pemerintah daerah Manggarai. Pemerintah diharapkan tetap menjalin kemitraan yang suportif-konstruktif dengan LSM dalam semangat saling belajar dan melengkapi. Dengan itu, proses pemberdayaan masyarakat bisa dijalankan secara lebih efektif dan akseleratif

Ketiga, untuk masyarakat Kabupaten Manggarai. Masyarakat diharapkan menyambut setiap peluang dan program pemberdayaan yang ditawarkan pemerintah dan LSM. Peluang dan program pemberdayaan dari pihak luar (LSM dan Pemerintah) perlu ditunjang oleh kesadaran dan komitmen dari dalam diri sendiri untuk berubah.

Pustaka Acuan

<https://ntt.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/699/index-pembangunan-manusia-2017-mencapai-63-73.html> diakses tanggal 1 November 2018

- <https://manggaraikab.bps.go.id/pressrelease/2018/07/18/91/profil-kemiskinan-provinsi-ntt-maret-2018.html> diakses tanggal 1 November 2018
- Badan Pusat Statistik, 2015. *Manggarai dalam Angka 2015*. Manggarai: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2016. *Kabupaten Manggarai dalam Angka 2016*. Manggarai: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Kabupaten Manggarai dalam Angka 2017*. Manggarai: Badan Pusat Statistik
- Cook, Sarah dan Steve Macaulay. 1997. *Perfect Empowerment*. Jakarta: Media Komputindo
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gemiharto, Ilham & Rosfiantika, Evi. "Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)" dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Vol 7 No 1 (2017). Jakarta: Universitas Komputer Indonesia
- Hagul, Peter. 1992. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali
- Miles, B. Mathew, A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Penerj. Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies
- Purwowibowo, Hendrijanto K., dan Soelistijono P.A. 2018. "Peningkatan Kapasitas Manusia Sebagai Fokus dari *People Centered Development*" *Jurnal Aristo (Sosial, Politik, Humaniora)*, Vol. 6. No. 2. Ponorogo: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkin Muncul Antithesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2018. *Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu – Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Wahana Visi Indonesia. 2019. *Area Programme Semi-Annual Progress Summary Manggarai Area Programme*. Manggarai: WVI